

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia merupakan salah satu bentuk konkret dari desentralisasi kekuasaan yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, tetapi juga untuk mendorong daerah agar mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara optimal dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, keberhasilan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kemampuan daerah dalam membangun kemandirian fiskal, yaitu kemampuan membiayai kebutuhan pembangunan tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Kemandirian fiskal menjadi prasyarat utama bagi terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat¹.

Kemandirian fiskal tersebut tercermin dari kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan indikator penting yang menggambarkan sejauh mana daerah mampu menggali potensi ekonomi lokal untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian fiskal yang dimiliki oleh daerah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa PAD memiliki posisi strategis dalam mendukung keberlanjutan pembangunan daerah, karena menjadi sumber pembiayaan utama

¹ C. Adam, M. Said, dan C. Chahyono, "Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor UPT Pendapatan Wilayah Tana Toraja," *Indonesian Journal of Business and Management* 6, no. 2 (2024): 227

yang relatif fleksibel dibandingkan dengan dana transfer yang memiliki keterikatan penggunaan ².

Dalam struktur PAD, pajak daerah menjadi komponen utama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap total penerimaan daerah. Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi besar, seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor akibat pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat. Kondisi ini menjadikan PKB sebagai salah satu sumber penerimaan yang paling potensial dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Selain itu, karakteristik PKB yang bersifat rutin dan memiliki basis objek pajak yang jelas menjadikannya relatif stabil sebagai sumber pendapatan daerah ³.

Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di berbagai wilayah menunjukkan peran yang sangat signifikan, bahkan dalam beberapa kasus menjadi sumber penerimaan utama atau tulang punggung keuangan daerah. Kondisi ini menegaskan bahwa optimalisasi pengelolaan pajak kendaraan bermotor merupakan langkah strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi daerah. Upaya optimalisasi tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah penerimaan semata, tetapi juga mencakup pembenahan sistem administrasi perpajakan, peningkatan kualitas

² R. Ridhawati, D. Lesmanawati, dan A. P. Lufty, "Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD Banjarmasin 1," *Dinamika Ekonomi* 15, no. 1 (2022): 37

³ D. A. K. Apriliyanti, H. Harianto, dan D. B. Hakim, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Selatan," *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 10, no. 4 (2021): 375

pelayanan kepada wajib pajak, serta penguatan mekanisme pengawasan dan kepatuhan pajak⁴.

Namun demikian, dalam praktiknya, optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor masih menghadapi berbagai kendala yang kompleks. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban perpajakan, serta keterbatasan sistem administrasi menjadi faktor utama yang menghambat peningkatan penerimaan pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi pajak yang besar belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah.⁵

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Cindy Adam, Miah Said, dan Chahyono mengungkapkan bahwa peningkatan pendapatan pajak kendaraan bermotor sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak serta intensitas sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Melalui pendekatan analisis SWOT, penelitian tersebut menegaskan bahwa strategi peningkatan penerimaan pajak harus dilakukan secara komprehensif melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, penguatan kerja sama antarinstansi, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, pengembangan layanan terpadu seperti layanan SAMSAT keliling dan inovasi pelayanan lainnya menjadi langkah penting dalam menjangkau masyarakat di daerah terpencil, sehingga dapat mempermudah proses pembayaran pajak dan meningkatkan kesadaran wajib pajak. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa optimalisasi pelayanan

⁴ Z. Zamzami, D. Dahmiri, dan H. Parkhurst, "Strategic Enhancement of Motor Vehicle Taxation in Jambi Province: A Pathway to Strengthened Regional Fiscal Autonomy," *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* 11, no. 4

⁵ M. G. Jainuri, "Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Studi Kritis Empiris di Daerah Khusus Istimewa Jakarta," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 8, no. 3 (2019): 338

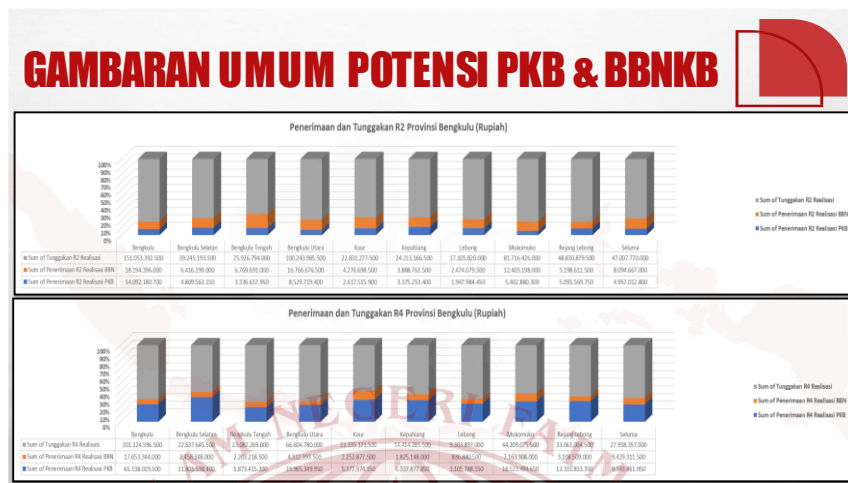
publik dan strategi kebijakan yang tepat memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor.⁶

Kebijakan opsen ini menjadi fenomena baru dalam sistem keuangan daerah di Indonesia, karena memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah kabupaten/kota untuk terlibat aktif dalam pemungutan pajak. Dengan adanya opsen, pemerintah daerah tidak lagi hanya bergantung pada mekanisme bagi hasil, tetapi dapat memperoleh pendapatan secara langsung dari wajib pajak, sehingga diharapkan mampu meningkatkan motivasi daerah dalam mengoptimalkan pemungutan pajak.



⁶ C. Adam, M. Said, dan C. Chahyono, "Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor UPT Pendapatan Wilayah Tana Toraja," *Indonesian Journal of Business and Management* 6, no. 2 (2024): 227

Fenomena terbaru yang melatarbelakangi penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Seluma, semakin dituntut untuk



mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Berdasarkan data perencanaan pengelolaan PAD tahun 2025, terlihat adanya fokus strategis pada sumber pendapatan dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai salah satu sektor potensial. Hal ini didorong oleh meningkatnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahun yang seharusnya berbanding lurus dengan penerimaan daerah. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa potensi tersebut belum tergarap secara maksimal akibat berbagai kendala seperti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, keterbatasan kinerja petugas pemungut, serta belum optimalnya koordinasi lintas pemerintah daerah. Kondisi ini menuntut adanya langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak yang lebih terarah, sistematis, dan berbasis data agar target PAD tahun 2026 dapat tercapai secara efektif.

Gambar 1. Gambaran Umum Potensi PKB dan BBNKB

Berdasarkan data potensi PKB dan BBNKB Provinsi Bengkulu, Kabupaten Seluma masih menghadapi fenomena tingginya tunggakan Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dibandingkan dengan realisasi penerimaannya. Pada kendaraan roda dua (R2), tunggakan mencapai sekitar Rp47 miliar, sedangkan pada kendaraan roda empat (R4) mencapai sekitar Rp27,94 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan masih belum tergalai secara optimal. Fenomena tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Seluma dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga diperlukan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengurangi tunggakan, serta mengoptimalkan penerimaan PKB dan BBNKB melalui inovasi pelayanan dan kebijakan perpajakan daerah.⁷



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

BADAN PENDAPATAN DAERAH

REALISASI BULANAN OPSEN PKB DAN BBN-KB WILAYAH KAB. SELUMA BULAN

DAFTAR : JANUARI SAMPAI BULAN DESEMBER

TAHUN 2025

Laporan Realisasi Bulanan OPSEN PKB dan BBN-KB WILAYAH Kab. Seluma Bulan Januari Sampai Bulan Desember Tahun 2025

NO.	BULAN	UNIT	OPSEN PKB		OPSEN BBN		JUMLAH	
			POKOK	OPSEN	POKOK	OPSEN	POKOK	OPSEN
1	Januari	2.145	662.452.050,00	429.295.950,00	445.820.500,00	294.325.500,00	1.108.272.550,00	723.621.450,00
2	Februari	2.418	724.658.750,00	457.485.250,00	557.470.000,00	368.057.500,00	1.282.128.750,00	825.542.750,00
3	Maret	2.668	834.143.550,00	527.624.450,00	699.055.000,00	461.515.500,00	1.533.198.550,00	989.139.950,00
4	April	2.902	837.211.400,00	521.495.600,00	564.156.000,00	372.441.000,00	1.401.367.400,00	893.936.600,00
5	Mei	2.706	997.019.700,00	641.749.300,00	694.694.500,00	458.593.000,00	1.691.714.200,00	1.100.342.300,00
6	Juni	3.033	1.218.501.650,00	790.177.350,00	1.342.656.000,00	886.282.000,00	2.561.157.650,00	1.676.459.350,00
7	Juli	3.838	1.387.465.550,00	904.991.450,00	1.359.096.000,00	897.165.000,00	2.746.561.550,00	1.802.156.450,00
8	Agustus	3.505	1.257.126.150,00	819.314.850,00	1.124.745.000,00	742.457.500,00	2.381.871.150,00	1.561.772.350,00
9	September	3.422	1.034.913.800,00	673.401.700,00	896.897.000,00	592.088.500,00	1.931.810.800,00	1.265.490.200,00
10	Oktober	3.369	1.229.998.850,00	797.320.150,00	1.054.061.000,00	695.802.500,00	2.284.059.850,00	1.493.122.650,00
11	November	3.330	1.285.720.150,00	835.398.850,00	1.022.793.000,00	675.163.500,00	2.308.513.150,00	1.510.562.350,00
12	Desember	3.089	1.241.048.000,00	794.369.000,00	1.079.212.500,00	712.413.500,00	2.320.260.500,00	1.506.782.500,00
-	TOTAL	36.425	12.710.259.600,00	8.192.623.900,00	10.840.656.500,00	7.156.305.000,00	23.550.916.100,00	15.348.928.900,00

Gambar 2. Laporan Realilasi OPSEN

Berdasarkan Laporan Realisasi Bulanan Opsen PKB dan Opsen BBNKB Kabupaten Seluma Tahun 2025, total realisasi Opsen PKB mencapai Rp8.192.623.900, sedangkan Opsen BBNKB mencapai Rp7.156.305.000, dengan

⁷ Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Bengkulu. Data Potensi Penerimaan dan Tunggakan PKB & BBNKB Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu

total penerimaan opsen sebesar Rp15.348.928.900. Meskipun demikian, optimalisasi penerimaan opsen masih menjadi tantangan sehingga diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memaksimalkan potensi penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, pengelolaan pajak tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan amanah. Oleh karena itu, optimalisasi opsen PKB di Kabupaten Seluma perlu didukung oleh transparansi, akuntabilitas, dan keadilan bagi wajib pajak agar tidak menimbulkan persepsi ketidakadilan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan demikian, diperlukan pendekatan administratif, teknis, dan normatif-religius agar kebijakan perpajakan selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam perspektif Islam.

Di Provinsi Bengkulu, kebijakan opsen PKB telah didukung berbagai regulasi teknis, termasuk program pemutihan pajak dan pengurangan denda guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan daerah. Namun, implementasinya di Kabupaten Seluma masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan akses layanan perpajakan, serta belum optimalnya pendataan kendaraan bermotor, sehingga masih terdapat kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan daerah.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap implementasi kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai instrumen fiskal baru dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya di Kabupaten Seluma. Kebijakan opsen PKB sebagai bagian dari reformasi pengelolaan pajak daerah memerlukan kajian mendalam

untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta dampaknya terhadap peningkatan penerimaan daerah. Selain itu, dinamika pelaksanaan di tingkat daerah menunjukkan adanya tantangan administratif, kelembagaan, serta kepatuhan wajib pajak yang berpotensi memengaruhi optimalisasi penerimaan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana kebijakan tersebut telah diimplementasikan dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengisi kesenjangan penelitian (research gap), yaitu masih terbatasnya kajian yang mengintegrasikan analisis kebijakan fiskal daerah dengan perspektif fiqh siyasah. Selama ini, sebagian besar penelitian cenderung berfokus pada aspek ekonomi dan administratif tanpa mengaitkannya dengan nilai-nilai normatif dalam tata kelola pemerintahan Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, dan amanah. Selain itu, penelitian empiris mengenai implementasi opsen PKB di tingkat kabupaten juga masih relatif minim, sehingga diperlukan kajian yang lebih kontekstual dan aplikatif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan kebijakan fiskal daerah yang tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

1. Belum optimalnya realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Seluma meskipun jumlah kendaraan bermotor terus meningkat setiap tahun.

2. Masih adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi PKB, yang menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kendaraan belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak.
3. Keterbatasan strategi dan inovasi pelayanan Bapenda, khususnya dalam pemanfaatan teknologi digital dan modernisasi sistem perpajakan untuk meningkatkan efisiensi pemungutan PKB.
4. Rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan sebagian masyarakat dalam membayar PKB, yang dipengaruhi oleh faktor sosialisasi, akses layanan, dan kualitas pelayanan publik.
5. Belum terintegrasinya perspektif Fiqh Siyasah secara komprehensif dalam pengelolaan dan optimalisasi PKB, terutama terkait prinsip keadilan, kemaslahatan, dan akuntabilitas penggunaan pajak bagi masyarakat.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Seluma dalam mengoptimalkan penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Bagaimana strategi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Seluma dalam mengoptimalkan penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut perspektif Fiqh Siyasah

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Seluma dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Untuk menganalisis strategi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Seluma dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah, khususnya yang berkaitan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi publik, keuangan daerah, dan hukum tata kelola pemerintahan, dengan memperkaya kajian mengenai optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memperluas khazanah keilmuan Fiqh Siyasah dalam konteks pengelolaan pajak daerah, terutama terkait prinsip keadilan, kemaslahatan, dan akuntabilitas dalam kebijakan fiskal pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis:

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah daerah, khususnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma, sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam merumuskan serta mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dan inovatif dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, hasil

penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dalam menyusun kebijakan perpajakan daerah yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan akuntabilitas sesuai perspektif Fiqh Siyasah. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan daerah, serta bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan referensi dalam pengembangan kajian terkait optimalisasi pajak daerah.

